



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI BANDUNG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **BUDI SANTOSO**
2. Jabatan : **HAKIM TINGGI**
3. NHK : **89727**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **2.160.000.000**

1. Tanah Seluas 9000 m2 di NGANJUK, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/54 m2 di SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 600 m2/400 m2 di BLITAR, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **578.000.000**

1. MOTOR, SUZUKI SHOGUN SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOTOR, HONDA SCOOPY SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
3. MOTOR, HONDA SUPRA X SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
4. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000
5. MOBIL, HONDA FREED MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
6. MOBIL, HONDA ACCORD SEDAN Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
7. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT JEEP Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 215.000.000



8. MOTOR, KAWASAKI NINJA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 36.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	1.026.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	74.175.307
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.838.175.307
III. HUTANG	Rp.	250.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.588.175.307

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.